

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia)

*Istiqamah; Syaparuddin; Selamat Rahmadi

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*E-mail korespondensi; istiqamahsulaiman@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: 1) the effect of economic growth on income inequality of provinces in Indonesia; 2) the effect of economic growth on the poverty of provinces in Indonesia. The data used are secondary data which includes time series data for 2010-2016 and cross section data of 34 provinces in Indonesia. Data were analyzed by panel data regression. The results of the analysis found that increasing economic growth led to increased income inequality and the number of poor people in the provinces in Indonesia.

Keywords : GRDP, Inequality income, Poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia; 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data deret waktu (*time series*) tahun 2010-2016 dan data deret lintang (*cross section*) 34 provinsi di Indonesia. Data dianalisis dengan regresi data panel. Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : PDRB, Ketimpangan pendapatan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga Jurnal Pendidikan dan nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2003).

Pada awalnya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Namun kenyataannya tidak demikian, hal ini terjadi karena angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan domestik dan nasional bruto belum sepenuhnya dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Apalagi ditambah kenyataan bahwa perbedaan

antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut (Arsyad, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana negara Indonesia saat ini telah banyak melakukan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Agustina dan Reny, 2014).

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Ketimpangan Pendapatan Indonesia dapat dilihat dari gini rasio. Angka gini rasio pada Tahun 2012-2016 mengalami penurunan dengan rata-rata yaitu sebesar 0,41%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan pada distribusi pendapatan di Indonesia.

Pada periode yang sama, rata-rata perkembangan ketimpangan pendapatan menurut Pulau di Indonesia cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan, rata-rata masih berada pada tingkat ketimpangan sedang.pulau dengan tingkat ketimpangan melebihi ketimpangan pendapatan Indonesia adalah Pulau Papua yaitu memiliki rata-rata sebesar 0,42%. Sedangkan enam pulau lainnya memiliki nilai rata-rata berada dibawah ketimpangan pendapatan Indonesia yaitu Pulau Jawa 0,40%, Pulau Sulawesi 0,40%, Kepulauan Nusa Tenggara 0,38 persen, Pulau Sumatera 0,35%, Pulau Kalimantan 0,34%, dan Kepulauan Maluku yaitu sebesar 0,33%.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan. Menurut Arsyad (1999) dalam Hajiji (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Menurut BPS pada periode 2012-2016 perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuatif yaitu dengan rata-rata sebesar -1,515%. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada tahun yang sama, rata-rata perkembangan jumlah penduduk miskin pada pulau di Indonesia cenderung tidak mengalami perubahan. pulau dengan rata-rata jumlah penduduk miskin lebih rendah dari pada rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia adalah Jawa yaitu sebesar -2,167% dan Kepulauan Maluku yaitu sebesar -3,002%. Sedangkan lima pulau lainnya memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin lebih tinggi dari pada Indonesia yaitu Pulau Sumatera -0,247%, Kepulaun Nusa Tenggara 0,728%, Pulau Kalimantan -0,291%, Pulau Sulawesi -0,285% dan Pulau Papua -1.112%. Terlihat dari data diatas bahwa masih banyak provinsi dengan rata-rata jumlah penduduk miskin di atas rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia.

Berdasarkan teori meningkatnya pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat sejalan dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Namun kenyataannya meningkatnya pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin.

Selama beberapa dasawarsa (1970 -1990-an) atau pemerintahan Orde Baru, Indonesia mencatat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 6% -7% per tahun, yang menjadikan salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai laju pertumbuhan yang relatif tinggi (Sudarlan, 2015). Pada Tahun 1998-1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat turun drastis yaitu sebesar -6,65%. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya krisis finansial global (Bank Dunia, 2016) . Kemudian pada Tahun 2012-2016

PDB Indonesia berfluktuatif cenderung menurun, dengan rata-rata sebesar 5,45% (Badan Pusat Statistik).

Selama tahun yang sama, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan memiliki rata-rata PDRB lebih kecil dibandingkan Indonesia hanya sebesar 4,95 dan 3,98%. Sedangkan lima Pulau lainnya memiliki rata-rata PDRB lebih besar dibandingkan Indonesia yaitu Pulau Jawa sebesar 5,69%, Kepulauan Nusa Tenggara 6,34%, Pulau Sulawesi 7,77%, Kepulauan Maluku 6,10% dan Pulau Papua 5,56%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada provinsi di Indonesia. (2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di Indonesia.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data deret waktu (*time series*) selama periode Tahun 2010 – 2016 dan data deret lintang (*cross section*) yaitu 34 provinsi di Indonesia. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Data dianalisis menggunakan analisis regresi data panel (*pooled data*). Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Adapun ketiga pendekatan tersebut yaitu: (Widarjono, 2007)

Koefisien tetap antar waktu dan individu (common effect)

Estimasi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

Slope Konstan tetapi Intersep Berbeda Antar Individu (Fixed Effect)

Model regresi *Fixed Effect* adalah model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar individu namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu.

Estimasi dengan pendekatan random effects

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model *Fixed Effect* membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *random effects*.

Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di Indonesia digunakan formulasi sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOGPDRB_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

- KP = Ketimpangan Pendapatan/ Gini Rasio
 PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Ribuan Rupiah)
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi
 i = Provinsi di Indonesia

t = Tahun (seri waktu 2010-2016)

μ = Faktor Pengganggu

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada provinsi di Indonesia digunakan formulasi sebagai berikut:

$$LOGJK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOGPDRB_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

JK = Jumlah penduduk miskin

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Ribuan Rupiah)

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

i = Provinsi di Indonesia

t = Tahun (seri waktu 2010-2016)

μ = Faktor Pengganggu

Untuk memilih model mana yang terbaik dalam mengestimasi data panel terdapat tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat mengestimasi regresi data panel, yaitu : (Widarjono, 2007)

Uji statistik F (Uji Chow)

Uji ini dilakukan untuk memilih antara metode *Pooled least Square* atau *fixed effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Hipotesis pengujian ini sebagai berikut:

H_0 = *Pooled Least Square*

H_1 = *Fixed Effect Model*

Apabila nilai F statistik > F Tabel dan nilai probabilitas signifikan pada α tertentu, maka H_0 ditolak sehingga model yang terbaik adalah *fixed Effect* dan sebaliknya.

Uji F statistik disini merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow. Uji F jika digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan residual *sum of square (RSS)*. Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/m}{(RSS_2)/(n - k)}$$

Dimana RSS_1 dan RSS_2 merupakan *residual sum of square* teknik tanpa variabel dummy dan teknik *fixed effect* dengan variabel dummy.

Hipotesis nol adalah bahwa intersep adalah sama. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n-k untuk denominator. M merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy.

Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau *Random Effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Hipotesis pengujian ini sebagai berikut:

H_0 = *Random Effect Model*

H_1 = *Fixed Effect Model*

Apabila Chi-Square Statistik > Chi-Square (χ^2) Tabel dan nilai probabilitas signifikan pada α tertentu, maka H_0 ditolak sehingga model yang terbaik adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya.

Uji secara formal dikembangkan oleh Hausman. Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji Statistik Hausman adalah sebagai berikut:

$$m = \hat{q}' \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Dimana:

$$\hat{q} = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{\text{GLS}}] \text{ dan}$$

$$\text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta} - \hat{\beta}_{\text{GLS}})$$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model *Random effect* lebih baik dari metode OLS digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Signifikan random effect ini dikembangkan Brue-Pagan. Metode Breush pagan untuk uji signifikan model random effect di dasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degre of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika LM statistik chi-square menolak hipotesis nol, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect dari metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik lebih kecil dari chi-square sebagai nilai kritis maka kita menerima hipotesis nol. Estimasi Random Effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS.

$$H_0 = \text{Pooled Least Square}$$

$$H_1 = \text{Random Effect Model}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia

Pada umumnya indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah Provinsi adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah disamping pembangunan fisik dan sosial. Melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan mampu mengurangi masalah pembangunan seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

PDRB provinsi-provinsi di Indonesia selama periode Tahun 2010-2016 diberikan pada Lampiran 1. Selanjutnya berdasarkan perkembangannya, selama Tahun 2010-2016 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,65 persen. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Provinsi di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 9,75 persen, sedangkan provinsi dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 1,51 persen. Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia selama periode Tahun 2010 – 2016 diberikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2010-2016

Provinsi	Pertumbuhan ekonomi (%)							Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Aceh	2,74	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,31	2,37
Sumatera Utara	6,42	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10	5,18	5,87
Sumatera Barat	5,94	6,34	6,31	6,08	5,88	5,52	5,26	5,90
Riau	4,21	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23	3,03
Jambi	7,35	7,86	7,03	6,84	7,36	4,20	4,37	6,43
Sumatera Selatan	5,63	6,36	6,83	5,31	4,79	4,42	5,03	5,48
Bengkulu	6,10	6,85	6,83	6,07	5,48	5,13	5,30	5,97
Lampung	5,88	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15	5,72
Kep. Bangka Belitung	5,99	6,90	5,50	5,20	4,67	4,08	4,11	5,21
Kep. Riau	7,19	6,96	7,63	7,21	6,60	6,01	5,03	6,66
Dki Jakarta	6,50	6,73	6,53	6,07	5,91	5,89	5,85	6,21
Jawa Barat	6,20	6,50	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67	5,90
Jawa Tengah	5,84	5,30	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28	5,37
Di Yogyakarta	4,88	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16
Jawa Timur	6,68	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55	6,10
Banten	6,11	7,03	6,83	6,67	5,51	5,40	5,26	6,12
Bali	5,83	6,66	6,96	6,69	6,73	6,03	6,24	6,45
Nusa Tenggara Barat	6,35	-3,91	-1,54	5,16	5,17	21,77	5,82	5,55
Nusa Tenggara Timur	5,25	5,67	5,46	5,41	5,05	5,03	5,18	5,29
Kalimantan Barat	5,47	5,50	5,91	6,05	5,03	4,86	5,22	5,43
Kalimantan Tengah	6,50	7,01	6,87	7,37	6,21	7,01	6,36	6,76
Kalimantan Selatan	5,59	6,97	5,97	5,33	4,84	3,83	4,38	5,27
Kalimantan Timur	5,10	6,47	5,48	-6,62	1,71	-1,21	-0,38	1,51
Kalimantan Utara	0	0,00	0,00	0,00	8,18	3,40	3,75	2,19
Sulawesi Utara	7,16	6,17	6,86	6,38	6,31	6,12	6,17	6,45
Sulawesi Tengah	8,74	9,82	9,53	9,59	5,07	15,52	9,98	9,75
Sulawesi Selatan	8,19	8,13	8,87	7,62	7,54	7,17	7,41	7,85
Sulawesi Tenggara	8,22	10,63	11,65	7,50	6,26	6,88	6,51	8,24
Gorontalo	7,63	7,71	7,91	7,67	7,27	6,22	6,52	7,28
Sulawesi Barat	11,89	10,73	9,25	6,93	8,86	7,39	6,03	8,73
Maluku	6,47	6,34	7,16	5,24	6,64	5,48	5,76	6,16
Maluku Utara	7,95	6,80	6,98	6,36	5,49	6,10	5,77	6,49
Papua Barat	28,47	3,64	3,63	7,36	5,38	4,15	4,52	8,16
Papua	-3,19	-4,28	1,72	8,55	3,65	7,47	9,21	3,30
PDB Indonesia	6,14	6,16	6,16	5,71	5,21	4,99	5,16	5,65

Sumber : BPS Indonesia (PDRB seri 2010)

Pada tahun 2011-2016 terdapat 4 Provinsi yang terus mengalami penurunan yaitu Provinsi Sumatera Barat dari 6,34 persen menurun menjadi 5,26 persen, Provinsi DKI Jakarta dari 6,73 persen menurun menjadi 5,85 persen, Provinsi Banten dari 7,03 persen menurun menjadi 5,26 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan dari 6,97 persen menurun menjadi 4,38 persen. Pada tahun 2011-2013 terdapat 9 Provinsi yang terus mengalami penurunan pertumbuhannya yaitu provinsi Aceh 3,28 persen turun menjadi 2,61 persen, Sumatera Utara 6,66 persen turun menjadi 6,07 persen, Riau 5,57 persen turun menjadi 2,48 persen, Jambi 7,86 persen turun menjadi 6,84 persen, Bengkulu 6,85 persen turun menjadi 6,07 persen, Kepulauan Bangka Belitung 6,90 persen turun menjadi 5,20 persen, Nusa Tenggara Timur 5,67 persen turun menjadi 5,41 persen, Kalimantan Timur 6,47 persen turun menjadi -6,47 persen dan Sulawesi Barat 10,73 turun menjadi 6,93 persen. Sedangkan 3 Provinsi lainnya selama periode yang sama terus mengalami peningkatan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat -3,91

persen meningkat menjadi 5,16 persen dan Kalimantan Barat 5,50 persen meningkat menjadi 6,05 persen. Dan 22 Provinsi lainnya berfluktuasi. Pada tahun 2014-2016 selain Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Selatan tidak ada Provinsi lain yang mengalami penurunan dan satu Provinsi lainnya mengalami peningkatan yaitu Provinsi Lampung 5,08 persen meningkat menjadi 5,15 persen.

Adanya perbedaan PDRB antar Provinsi di Indonesia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi pada wilayah tertentu dan alokasi dana pembangunan yang berbeda antar wilayah.

Ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Salah satu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna.

Tabel 2. Ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia 2010-2016

Provinsi	Gini Ratio							Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Aceh	0.30	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33
Sumatera Utara	0.35	0.31	0.33	0.33	0.31	0.33	0.31	0.32
Sumatera Barat	0.33	0.33	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.33
Riau	0.33	0.32	0.38	0.39	0.38	0.37	0.35	0.36
Jambi	0.30	0.35	0.36	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34
Sumatera Selatan	0.34	0.40	0.40	0.38	0.38	0.33	0.36	0.37
Bengkulu	0.37	0.37	0.36	0.37	0.36	0.37	0.35	0.36
Lampung	0.36	0.32	0.36	0.36	0.33	0.35	0.36	0.35
Kep. Bangka Belitung	0.30	0.32	0.31	0.31	0.30	0.28	0.29	0.30
Kep. Riau	0.29	0.38	0.39	0.38	0.44	0.34	0.35	0.37
Dki Jakarta	0.36	0.40	0.44	0.40	0.44	0.42	0.40	0.41
Jawa Barat	0.36	0.38	0.42	0.41	0.40	0.43	0.40	0.40
Jawa Tengah	0.34	0.36	0.37	0.39	0.39	0.38	0.36	0.37
Di Yogyakarta	0.41	0.42	0.45	0.42	0.44	0.42	0.43	0.43
Jawa Timur	0.34	0.35	0.36	0.37	0.40	0.40	0.40	0.38
Banten	0.42	0.39	0.38	0.38	0.42	0.39	0.39	0.40
Bali	0.37	0.39	0.40	0.44	0.44	0.40	0.37	0.40
Nusa Tenggara Barat	0.40	0.37	0.35	0.35	0.39	0.36	0.37	0.37
Nusa Tenggara Timur	0.38	0.33	0.36	0.34	0.36	0.35	0.36	0.35
Kalimantan Barat	0.37	0.36	0.40	0.38	0.40	0.33	0.33	0.37
Kalimantan Tengah	0.30	0.33	0.33	0.36	0.37	0.30	0.35	0.33
Kalimantan Selatan	0.37	0.35	0.36	0.36	0.33	0.33	0.35	0.35
Kalimantan Timur	0.37	0.32	0.36	0.37	0.36	0.32	0.33	0.35
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	0.31	0.31	0.31
Sulawesi Utara	0.37	0.36	0.43	0.45	0.44	0.37	0.38	0.40
Sulawesi Tengah	0.37	0.39	0.39	0.39	0.35	0.37	0.35	0.37
Sulawesi Selatan	0.40	0.43	0.42	0.43	0.45	0.40	0.40	0.42
Sulawesi Tenggara	0.42	0.39	0.40	0.39	0.40	0.38	0.39	0.40
Gorontalo	0.43	0.40	0.41	0.45	0.45	0.40	0.41	0.42
Sulawesi Barat	0.36	0.37	0.34	0.32	0.38	0.36	0.37	0.36
Maluku	0.33	0.36	0.38	0.35	0.33	0.34	0.34	0.35
Maluku Utara	0.34	0.34	0.31	0.32	0.32	0.29	0.31	0.32
Papua Barat	0.38	0.37	0.41	0.42	0.41	0.43	0.40	0.40
Papua	0.41	0.38	0.45	0.44	0.46	0.39	0.40	0.42
Indonesia	0.38	0.39	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.40

Sumber : BPS Indonesia

Selama tahun 2010-2016 perkembangan ketimpangan pendapatan dilihat dari rata-rata Gini Ratio di Indonesia adalah sebesar 0,40 yang berarti ketimpangan Indonesia berada pada tingkat ketimpangan sedang. Selama periode yang sama rata-rata Gini Ratio pada Provinsi di Indonesia tidak ada yang berada pada tingkat ketimpangan tinggi, yang ada hanya sedang dan rendah. Rata-rata Gini Ratio Provinsi dengan tingkat ketimpangan sedang adalah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Sedangkan tingkat Gini Ratio rendah adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Berikut Tabel perkembangan ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2010-2012 terdapat 2 Provinsi yang terus mengalami peningkatan yaitu Provinsi Riau dari -1,51 persen meningkat menjadi 18,21 persen dan Provinsi Jawa Barat dari -2,47 persen meningkat menjadi 11,05 persen. Sedangkan pada periode yang sama 4 Provinsi lainnya terus mengalami penurunan yaitu Provinsi Bali 16,19 persen menurun menjadi 2,58 persen, Sulawesi Tengah 8,28 persen menurun menjadi -0,26 persen, Sulawesi Barat 20,93 persen menurun menjadi -9,70 persen dan Maluku Utara 2,75 persen menurun menjadi -10,79 persen. Dan 23 Provinsi lainnya selama periode yang sama mengalami fluktuasi.

Jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia

Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia selama periode Tahun 2010 – 2016 diberikan pada Lampiran 2. Berdasarkan lampiran 2 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Tahun 2016 adalah sebanyak 27764,32 ribu jiwa. Pada tahun tersebut, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 4638,53 ribu jiwa sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 47,03 ribu jiwa.

Selanjutnya Tabel 3 memberikan pertumbuhan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia selama periode Tahun 2010 – 2016. Pada tahun 2010-2012 terdapat 2 Provinsi mengalami peningkatan yaitu Provinsi Riau dari -5,16 persen meningkat menjadi -0,15 persen dan Provinsi Jawa Tengah -6,23 persen. Sedangkan 4 Provinsi lainnya selama periode yang sama mengalami penurunan yaitu Provinsi Sumatera Utara -0,59 persen menurun menjadi -6,94 persen, Nusa Tenggara Timur 0,09 persen menurun menjadi -1,24 persen, Maluku -0,36 persen menurun menjadi -5,95 persen dan Papua Barat -0,23 persen menurun menjadi -10,65 persen. Selanjutnya 27 Provinsi lainnya mengalami fluktuasi. Tabel 3 memberikan perkembangan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2016.

Selama tahun 2013-2016 terdapat satu Provinsi yang jumlah kemiskinannya mengalami kenaikan yaitu Provinsi Jawa Tengah -3,26 persen meningkat menjadi -0,27 persen dan satu Provinsi mengalami penurunan yaitu Provinsi Kalimantan Tengah 2,44 persen menurun menjadi -7,24 persen. Sedangkan 31 Provinsi lainnya selama periode yang sama berfluktuasi.

Tabel 3. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2010-2016

Provinsi	Pertumbuhan jumlah penduduk miskin (%)							Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Aceh	-3,47	3,82	-2,04	-2,38	-2,14	2,63	-2,11	-0,81
Sumatera Utara	-0,59	-0,64	-6,94	0,90	-2,17	10,84	-3,69	-0,33
Sumatera Barat	0,18	2,81	-10,01	-4,33	-6,80	-1,47	7,72	-1,70
Riau	-5,16	-3,64	-0,15	8,56	-4,64	12,97	-10,90	-0,42
Jambi	-3,24	12,86	-0,95	4,25	0,06	10,58	-6,66	2,42
Sumatera Selatan	-3,61	-4,52	-3,05	6,35	-2,02	2,46	-1,44	-0,83
Bengkulu	0,25	-6,57	2,26	3,20	-1,22	2,00	0,86	0,11
Lampung	-5,03	-12,25	-6,14	-6,95	0,85	-3,78	3,55	-4,25
Kep. Bangka Belitung	-11,59	6,36	-2,57	0,98	-5,18	-0,91	6,68	-0,89
Kep. Riau	1,13	-0,08	1,28	-4,73	-0,68	-7,52	3,75	-0,98
Dki Jakarta	-3,40	16,41	0,92	2,43	9,87	-10,69	4,66	2,89
Jawa Barat	-4,21	-2,62	-4,89	-0,88	-3,28	5,82	-7,08	-2,45
Jawa Tengah	-6,23	-4,88	-4,78	-3,26	-3,04	-1,23	-0,27	-3,38
Di Yogyakarta	-1,45	-2,84	0,22	-4,79	-0,48	-8,83	0,67	-2,50
Jawa Timur	-8,19	-3,13	-7,39	-1,91	-2,41	0,58	-2,88	-3,62
Banten	-3,80	-8,93	-6,12	5,32	-4,91	6,39	-4,77	-2,40
Bali	-3,74	-4,97	-3,18	15,89	5,05	11,66	-20,04	0,10
Nusa Tenggara Barat	-3,96	-11,35	-7,43	-3,12	1,77	-1,76	-1,96	-3,97
Nusa Tenggara Timur	0,09	-0,12	-1,25	0,89	-1,71	17,00	-0,90	2,00
Kalimantan Barat	-1,38	-11,35	-6,42	10,82	-3,11	6,18	-3,75	-1,29
Kalimantan Tengah	-0,98	-10,54	-3,41	2,44	2,38	-0,46	-7,20	-2,54
Kalimantan Selatan	3,40	6,96	-2,78	-3,14	3,40	-0,18	-2,64	0,72
Kalimantan Timur	1,58	2,02	-0,72	3,98	-1,26	-16,90	0,60	-1,53
Sulawesi Utara	-5,85	-5,72	-8,91	12,74	-1,30	9,92	-7,74	-0,98
Sulawesi Tengah	-3,03	-10,81	-3,31	-2,32	-3,26	4,98	1,68	-2,30
Sulawesi Selatan	-5,20	-8,82	-3,24	6,39	-5,96	7,21	-7,83	-2,49
Sulawesi Tenggara	-7,75	-17,64	-7,80	7,38	-3,86	9,85	-5,14	-3,57
Gorontalo	-6,56	-5,54	-5,32	7,05	-2,92	5,85	-1,37	-1,26
Sulawesi Barat	-10,68	16,65	-2,61	-3,96	0,32	-0,96	-4,12	-0,77
Maluku	-0,36	-4,84	-5,95	-4,83	-4,80	6,76	1,22	-1,83
Maluku Utara	-7,07	6,85	-9,26	-2,81	-1,20	-14,32	5,16	-3,23
Papua Barat	-0,23	-2,50	-10,65	4,92	-3,74	0,04	-0,86	-1,86
Papua	0,17	24,05	3,34	8,36	-18,33	3,95	1,85	3,34
Indonesia	-4,63	-3,24	-4,74	-0,14	-2,89	2,83	-2,63	-4,63

Sumber : BPS Indonesia

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Uji Chow model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia diberikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji statistik F (Uji Chow) model ketimpangan pendapatan

Effects Test	Statistik	d.f	Prob.
Cross-section F	13.315739	(33,203)	0.0000
Cross-section Chi-square	274.184415	33	0.0000

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai F-Statistik sebesar 13,315739 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$ atau signifikan pada $\alpha = 5\%$. Karena F-Statistik signifikan, maka H_1 diterima, sedangkan H_0 ditolak, sehingga model model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Pooled Least Square*

Uji Hausman model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia diberikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji Hausman model ketimpangan pendapatan

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	17.921696	1	0.0000

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square Statistik sebesar 17,921696 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$ atau signifikan pada $\alpha = 5\%$. Karena Chi-Square Statistik > signifikan, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga model model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Random Effect*.

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman dapat dikemukakan bahwa model terbaik adalah model Fixed Effect. Estimasi model Fixed Effect ketimpangan pendapatan diberikan pada Tabel 6.

Tabel 6. *Fixed effect model* pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.201371	0.024284	8.292336	0.0000
LOGPDRB?	0.014576	0.002213	6.585664	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_A—C	-0.031441			
_SUMUT—C	-0.047830			
_SUMBAR—C	-0.030850			
_R—C	-0.011227			
_J—C	-0.023772			
_SUMSEL—C	0.003030			
_B—C	0.009265			
_L—C	-0.017537			
_KEPBABEL—C	-0.057322			
_KEPRI—C	0.003922			
_DKIJ—C	0.030384			
_JABAR—C	0.021790			
_JATENG—C	-0.004693			
_DIY—C	0.065081			
_JATIM—C	-0.002219			
_BNTN—C	0.027786			
_BLI—C	0.038193			
_NTB—C	0.008818			
_NTT—C	-0.003912			
_KALBAR—C	0.006076			
_KALTENG—C	-0.025074			
_KALSEL—C	-0.011748			
_KALTIM—C	-0.024829			
_KALUT—C	-0.201763			
_SULUT—C	0.039151			
_SULTENG—C	0.012305			
_SULSEL—C	0.052412			
_ST—C	0.037239			
_G—C	0.070593			
_SULBAR—C	0.005695			
_M—C	-0.005579			
_MU—C	-0.033447			
_PB—C	0.045017			
_P—C	0.056488			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.807774	Mean dependent var		0.360748
Adjusted R-squared	0.775578	S.D. dependent var		0.065438
S.E. of regression	0.031000	Akaike info criterion		-3.974590
Sum squared resid	0.195086	Schwarz criterion		-3.463962
Log likelihood	507.9762	Hannan-Quinn criter.		-3.768798
F-statistic	25.08966	Durbin-Watson stat		1.597373
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi diperoleh nilai t-statistik sebesar 6,585664 dengan probabilitas 0,0000. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,014576. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat ketimpangan pendapatan adalah positif, yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Indonesia meningkat sebesar 0,014576.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan pertumbuhan ekonomi tidak disumbangkan oleh setiap penduduk secara merata. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi tidak di pergunakan untuk memperbesar belanja daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Provinsi di Indonesia

Uji Chow model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia diberikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil uji statistik F (Uji Chow)

Effects Test	Statistik	d.f	Prob.
Cross-section F	98.083504	(33,203)	0.0000
Cross-section Chi-square	673.528037	33	0.0000

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai F Statistik sebesar 98,083504 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$ atau signifikan pada $\alpha = 5\%$. Karena F-Statistik signifikan, maka H_1 diterima, sedangkan H_0 ditolak, sehingga model model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Pooled Least Square*

Uji Hausman model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia diberikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	41.607535	1	0.0000

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square Statistik sebesar 41,607535 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$ atau signifikan pada $\alpha = 5\%$. Karena Chi-Square Statistik > signifikan, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga model model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Random Effect*.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman model yang terbaik dalam mengestimasi model kemiskinan adalah *Fixed Effect*. Estimasi model Fixed Effect kemiskinan diberikan pada Tabel 9.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t-statistik sebesar 9,003560 dengan probabilitas 0,0000. nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,076508. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah positif, yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Provinsi di Indonesia meningkat sebesar 0,0076508.

Pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat disebabkan pertumbuhan ekonomi tidak di pergunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan berupa pemberian modal sehingga para penduduk miskin dapat membuat UMKM.

Tabel 9. *Fixed Effect Model* pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.759420	0.093235	18.87078	0.0000
LOGPDRB?	0.076508	0.008498	9.003560	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_A—C	0.330785			
_SUMUT—C	0.510631			
_SUMBAR—C	-0.018752			
_R—C	0.054945			
_J—C	-0.160527			
_SUMSEL—C	0.409544			
_B—C	-0.063201			
_L—C	0.462673			
_KEPBABEL—C	-0.730792			
_KEPRI—C	-0.515448			
_DKIJ—C	-0.119912			
_JABAR—C	0.967353			
_JATENG—C	1.013509			
_DIY—C	0.135559			
_JATIM—C	1.013406			
_BNTN—C	0.193088			
_BLI—C	-0.345855			
_NTB—C	0.335688			
_NTT—C	0.440803			
_KALBAR—C	-0.009947			
_KALTENG—C	-0.420364			
_KALSEL—C	-0.328548			
_KALTIM—C	-0.274882			
_KALUT—C	-1.757187			
_SULUT—C	-0.286685			
_SULTENG—C	0.030498			
_SULSEL—C	0.296986			
_ST—C	-0.061480			
_G—C	-0.244766			
_SULBAR—C	-0.364808			
_M—C	-0.022700			
_MU—C	-0.615634			
_PB—C	-0.207587			
_P—C	0.353608			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.966385	Mean dependent var		2.595989
Adjusted R-squared	0.960755	S.D. dependent var		0.600807
S.E. of regression	0.119022	Akaike info criterion		-1.283971
Sum squared resid	2.875725	Schwarz criterion		-0.773343
Log likelihood	187.7926	Hannan-Quinn criter.		-1.078179
F-statistic	171.6477	Durbin-Watson stat		1.387113
Prob(F-statistic)	0.000000			

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama Tahun 2010-2016 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,65 persen. Rata-rata Gini Ratio di Indonesia adalah sebesar 0,40 yang berarti ketimpangan Indonesia berada pada tingkat ketimpangan sedang. Selanjutnya jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Tahun 2016 adalah sebanyak 27764,32 ribu jiwa.

Pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan maupun mengurangi jumlah penduduk miskin.

Saran

Diperlukan kebijakan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat dan dapat dirasakan setiap warga negara, melalui kebijakan pembangunan infrastruktur serta merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Selain itu perlu peningkatan penerapan pajak progresif dan pemberian bantuan kepada masyarakat golongan bawah agar perbedaan pendapatan antara kalangan masyarakat menengah ke atas dan kalangan masyarakat menengah kebawah tidak semakin jauh. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R.(2009).*Metodologi Penelitian Sosial dan Eekonomi (Teori dan Aplikasi)*. cv. Alfabeta: Bandung.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Candra, D., Hidayat, S., & Rosmeli. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 12 (2). 67 - 76
- Delis, A., Mustika, C. & Umiyati, E., (2015), Pengaruh FDI terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia 1993 - 2013. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10 (1). 231 - 245
- Badan Pusat Statistik.(2018).*Gini Ratio 2002-2018*. Dalam <https://www.bps.go.id> Diakses 20 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2018*. Dalam <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>.Diakses 20 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) Atas dasar Harga Konstan*. Dalam <https://www.bps.go.id>. Diakses 20 Februari 2018.
- Hajiji, A. (2010). *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008*.Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Hasdi, S. (2001).*Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah*.Guritno Mangkoesobroto:Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Alfabeta. Bandung.

- Todaro, M.P., & Stephen C.S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Erlangga: Jakarta.
- Umiyati, E. (2014). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 9(2). 42 - 50
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua . Ekonisia: Yogyakarta.

Lampiran 1. PDRB ADHK 2000 provinsi-provinsi di Indonesia, 2010-2016 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	101545,24	104874,21	108914,9	111755,83	113490,36	112661,04	116386,73
Sumatera Utara	331085,24	353147,59	375924,14	398727,14	419573,31	440955,85	463775,46
Sumatera Barat	105017,74	111679,49	118724,42	125940,63	133340,84	140704,88	148110,75
Riau	388578,23	410215,84	425626	436187,51	447986,78	448991,96	458998,09
Jambi	90618,41	97740,87	104615,08	111766,13	119991,44	125036,4	130499,63
Sumatera Selatan	194012,97	206360,7	220459,2	232175,05	243297,77	254044,88	266815,41
Bengkulu	28352,57	30295,05	32363,04	34326,37	36207,15	38066,01	40082,87
Lampung	150560,84	160437,5	170769,21	180620,01	189797,49	199536,1	209807,19
Kep. Bangka Belitung	35561,9	38013,99	40104,91	42190,86	44159,44	45961,46	47852,69
Kep. Riau	111223,67	118961,42	128034,97	137263,85	146325,23	155112,88	162922,5
Dki Jakarta	1075183,48	1147558,23	1222527,92	1296694,57	1373389,13	1454345,82	1539376,65
Jawa Barat	906685,76	965622,06	1028409,74	1093543,55	1149216,06	1207083,41	1275546,48
Jawa Tengah	623224,62	656268,13	691343,12	726655,12	764959,15	806775,36	849383,56
Di Yogyakarta	64678,97	68049,87	71702,45	75627,45	79536,08	83474,44	87687,93
Jawa Timur	990648,84	1054401,77	1124464,64	1192789,8	1262684,5	1331394,99	1405236,11
Banten	271465,28	290545,84	310385,59	331099,11	349351,23	368216,55	387595,37
Bali	93749,35	99991,63	106951,46	114103,58	121787,57	129130,59	137192,52
Nusa Tenggara Barat	70122,73	67379,14	66340,81	69766,71	73372,96	89344,58	94548,21
Nusa Tenggara Timur	43846,61	46334,13	48863,19	51505,19	54107,97	56831,92	59775,7
Kalimantan Barat	86065,85	90797,59	96161,93	101980,34	107114,96	112324,86	118184,63
Kalimantan Tengah	56531,02	60492,93	64649,17	69410,99	73724,52	78890,97	83909,49
Kalimantan Selatan	85305	91252,13	96697,84	101850,54	106779,4	110867,88	115727,55
Kalimantan Timur	418211,58	445264,42	469646,25	438532,91	446029,05	440647,7	438977,04
Kalimantan Utara	-	-	-	44091,7	47696,35	49316	51164,99
Sulawesi Utara	51721,33	54910,9	58677,59	62422,5	66360,76	70425,14	74771,07
Sulawesi Tengah	51752,07	56833,83	62249,53	68219,32	71677,53	82803,2	91070,55
Sulawesi Selatan	171740,74	185708,47	202184,59	217589,13	233988,05	250758,28	269338,55
Sulawesi Tenggara	48401,15	53546,69	59785,4	64268,71	68291,78	72991,33	77739,55
Gorontalo	15475,74	16669,09	17987,07	19367,57	20775,8	22068,59	23507,15
Sulawesi Barat	17183,83	19027,5	20786,89	22227,39	24195,65	25983,65	27550,26
Maluku	18428,58	19597,39	21000,08	22100,94	23567,73	24859,06	26291,19
Maluku Utara	14983,91	16002,45	17120,07	18208,74	19208,76	20381,03	21556,32
Papua Barat	41361,67	42867,19	44423,34	47694,23	50259,91	52346,49	54711,28
Papua	110808,18	106066,72	107890,94	117118,82	121391,23	130459,91	142476,35
PDB Indonesia	6864133,1	7286914,76	7735785,48	8177822,29	8603635,94	9032793,21	9498569,82

Sumber: BPS Indonesia

Lampiran 2. Jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia, September 2010-2016 (Ribu Jiwa)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	861,85	894,81	876,56	855,71	837,42	859,41	841,31
Sumatera Utara	1490,89	1481,31	1378,45	1390,8	1360,6	1508,14	1452,55
Sumatera Barat	430,02	442,09	397,86	380,63	354,74	349,53	376,51
Riau	500,26	482,05	481,31	522,53	498,28	562,92	501,59
Jambi	241,61	272,67	270,08	281,57	281,75	311,56	290,81
Sumatera Selatan	1125,73	1074,81	1042,04	1108,21	1085,8	1112,53	1096,5
Bengkulu	324,93	303,6	310,47	320,41	316,5	322,83	325,6
Lampung	1479,93	1298,71	1218,99	1134,28	1143,93	1100,68	1139,78
Kep. Bangka Belitung	67,75	72,06	70,21	70,9	67,23	66,62	71,07
Kep. Riau	129,66	129,56	131,22	125,02	124,17	114,83	119,14
Dki Jakarta	312,18	363,42	366,77	375,7	412,79	368,67	385,84
Jawa Barat	4773,72	4648,63	4421,48	4382,65	4238,96	4485,65	4168,11
Jawa Tengah	5369,16	5107,36	4863,41	4704,87	4561,82	4505,78	4493,75
Di Yogyakarta	577,3	560,88	562,11	535,18	532,59	485,56	488,83
Jawa Timur	5529,3	5356,21	4960,54	4865,82	4748,42	4775,97	4638,53
Banten	758,16	690,49	648,25	682,71	649,19	690,67	657,74
Bali	174,93	166,23	160,95	186,53	195,95	218,79	174,94
Nusa Tenggara Barat	1009,35	894,77	828,33	802,45	816,62	802,29	786,58
Nusa Tenggara Timur	1014,09	1012,9	1000,29	1009,15	991,88	1160,53	1150,08
Kalimantan Barat	428,76	380,11	355,7	394,17	381,92	405,51	390,32
Kalimantan Tengah	164,22	146,91	141,9	145,36	148,82	148,13	137,46
Kalimantan Selatan	181,96	194,62	189,21	183,27	189,5	189,16	184,16
Kalimantan Timur	243	247,9	246,11	255,91	252,68	209,99	211,24
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	40,93	47,03
Sulawesi Utara	206,72	194,9	177,54	200,16	197,56	217,15	200,35
Sulawesi Tengah	474,99	423,63	409,6	400,09	387,06	406,34	413,15
Sulawesi Selatan	913,43	832,91	805,92	857,45	806,35	864,51	796,81
Sulawesi Tenggara	400,7	330	304,25	326,71	314,09	345,02	327,29
Gorontalo	209,89	198,27	187,73	200,97	195,1	206,51	203,69
Sulawesi Barat	141,33	164,86	160,55	154,2	154,69	153,21	146,9
Maluku	378,63	360,32	338,89	322,51	307,02	327,78	331,79
Maluku Utara	91,07	97,31	88,3	85,82	84,79	72,65	76,4
Papua Barat	256,25	249,84	223,24	234,23	225,46	225,54	223,6
Papua	761,62	944,79	976,37	1057,98	864,11	898,21	914,87
Indonesia	31023,39	30018,93	28594,64	28553,93	27727,78	28513,57	27764,32

Sumber: BPS Indonesia